**EVOLUSI KEBIJAKAN LUAR NEGERI RI SEJAK ERA KEMERDEKAAN SAMPAI PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO (2019 – 2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Periode**        **Dimensi** | **Periode Perjuangan Pengakuan Kemerdekaan RI dan pembentukan watak dasar kebijakan luar negeri RI**  **1945 - 1949** | **Periode Demokrasi Liberal dan Ujian Prinsip Bebas Aktif**  **1950an** | **Periode Radikalisasi Kebijakan Luar Negeri RI**  **1959 – 1965 Demokrasi Terpimpin** | **Periode Pragmatisme Pembangunan dan Dominasi ABRI 1966 – 1989 Orde Baru I (Perang Dingin)** | **Periode Soeharto ditinggalkan oleh AS (Barat) Pasca Perang Dingin**  **1989 - 1998** | **Periode Transisi Menuju Demokrasi 1998 - 2004** | **Periode SBY**  **Pembentukan Identitas Baru Kebijakan Luar Negeri RI sebagai Demokrasi yang Stabil, *Emerging Market* dan Islam Moderat**  **2004 - 2014** | **Periode Jokowi : Substansiasi Identitas Baru: pembangunan infrastruktur, *good governance* dan kekuatan moderat**  **Jokowi 2014 - Sekarang** |
| **Tipe rezim politik** | Dari Sistem Presidensial ke Demokrasi Parlementer | Demokrasi Liberal | Demokrasi Terpimpin | “Demokrasi Pancasila” – Sistem Pemerintahan yang Otoriter, Sentralistis dan Dominasi ABRI (TNI), pembangunan ekonomi sebagai sumber legitimasi kekuasaan Orde Baru, politik yang otoriter diperlukan untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi | Melanjutkan liberalisasi ekonomi (deregulasi dan debirokratisasi) Konsolidasi kekuasaan Soeharto dengan menggandeng ICMI, kontrol atas ABRI, dan pembatasan kebebasan *civil society* | Transisi Menuju Demokrasi | Awal Konsolidasi Demokrasi – Sistem Presidensial Berbasis Banyak Partai | Konsolidasi Demokrasi – Peningkatan Kualitas Sistem Presidensial Berbasis Banyak Partai, reformasi birokrasi untuk fasilitasi investasi dan *tax amnesty* |
| **Lingkungan internasional** | Pemenang Perang Dunia II Membangun Tatanan Dunia, Awal Perang Dingin, Belanda ingin menguasai kembali Indonesia | Politik Pembendungan Komunisme oleh AS (*Containment Policy*) – Ujian Bagi Prinsip Bebas Aktif – Dekolonisasi Asia - Afrika | Intensitas Perang Dingin dan Perebutan Pengaruh adikuasa di Asia Tenggara, Pembentukan Gerakan Non-Blok, Konfrontasi dengan Malaysia | Perebutan pengaruh AS – Uni Soviet Berlanjut via dukungan politik dan bantuan ekonomi | Pasca Perang Dingin, Isu Ekonomi, Demokrasi dan HAM, Lingkungan Hidup | Krisis ekonomi Asia dan pemulihannya dengan intervensi IMF dan Bank Dunia dan Kebangkitan China di Asia | Persaingan AS dan China di Asia Pasifik, Wacana TPP, RCEP, terbentuknya G20, BRICS dan krisis ekonomi global 2008 dan kemunculan ISIS | Perkembangan Fintech, IoT, Artificial Intelligence, Cyber Security, BRI (*Belt and Road Initiative*) China, *de facto control* China di Laut China Selatan, Wacana Kawasan Indo-Pasifik dan implikasinya terhadap deklarasi Poros Maritim Dunia, Prinsip *America First* Presiden AS Donald Trump, Perang Dagang AS – China, proteksionisme dan anti-multilateralisme AS dan mundurnya AS dari TPP |
| **Lingkungan regional** | Solidaritas dan dukungan negara-negara Asia (India, Pakistan, dan negara-negara di Timur Tengah untuk kemerdekaan Indonesia | Persaingan AS dan Uni Soviet di Asia Tenggara dan terbentuknya SEATO dan negara federal Malaysia | Penyebaran pengaruh komunisme di Asia Tenggara, awal Perang Vietnam, konfrontasi RI – Malaysia dan kawasan Asia Tenggara yang tidak stabil | Negara-negara di Asia Tenggara fokus pada pembangunan sosial ekonomi dan terbentuknya ASEAN 1967 | Awal integrasi ekonomi ASEAN (AFTA), APEC, terbentuknya ARF, Promosi *Asian Values* oleh Pemimpin Asia | Terbentuknya ASEAN + 3 yang membantu pemulihan krisis ekonomi di Asia Tenggara, Bali Concord II 2003 dengan 3 pilar ASEAN Communities (AEC, APSC, ASCC) | Keketuaan Indonesia di ASEAN dan gagalnya ASEAN Communique di KTT ASEAN Kamboja tentang Laut China Selatan dan meningkatnya hubungan dagang, investasi dan pinjaman dari China untuk ASEAN dan pembentukan ASEAN – China Free Trade Agreement (CAFTA). | Dampak regional dari proteksionisme AS, rangkaian negosiasi RCEP, akselerasi BRI, kebijakan *Act East* India ke ASEAN, Wacana Indo-Pacific dengan berbagai versi, inisiatif Indonesia untuk kerja sama Indo-Pasifik yang terbuka dan inklusif |
| **Karakteristik utama kebijakan luar negeri dan diplomasi RI** | Diplomasi memperjuangan pengakuan Belanda dan dunia internasional untuk kemerdekaan Indonesia | Mempertahankan prinsip bebas aktif, inisiatif Konferensi Asia -Afrika 1955, Deklarasi Djuanda 1957 yang kemudian pada tahun 1982 Indonesia diakui sebagai negara kepulauan dalam The United Nations Convention on Law of the Sea atau UNCLOS. | Radikalisasi kebijakan luar negeri anti-neo-imperialisme dan neo-kolonialisme, Konfrontasi dengan Malaysia dan turut mendirikan Gerakan Non-Blok | Pragmatisme pembangunan yang memerlukan dukungan dan bantuan Barat (AS), stabilitas regional melalui pembentukan ASEAN, membuka pintu investasi asing, invasi dan pendudukan atas Timor Timur | Sejak akhir 1980an Soeharto memperkenalkan kebijakan luar negeri yang lebih asertif, *high profile*, *international activism*, resistensi terhadap kritik Barat tentang demokrasi dan HAM di Indonesia khususnya di Timor Timur. | Dukungan IMF dan Bank Dunia untuk pemulihan dari krisis ekonomi, mobilisasi dukungan internasional untuk keutuhan NKRI, dukungan RI untuk perang melawan terorisme global | Motto *million friends, zero enemies*, peran aktif RI di ASEAN, anggota aktif di G20, promosi demokrasi melalui BDF, strategi globalisasi menuju *one trillion-dollar economy* | Poros Maritim Dunia, dukungan internasional untuk pembangunan infrastruktur, diplomasi ekonomi dan perluasan pasar non-tradisional, dukungan untuk perjuangan Palestina, perlindungan TKI di luar negeri, peningkatan daya saing nasional, dan inisiatif kerja sama Indo-Pasifik |
| **Implementasi Prinsip Bebas Aktif** | Lahirnya prinsip bebas aktif 2 September 1949 | Ujian bagi konsistensi prinsip bebas aktif | Condong ke blok Timur (Uni Soviet) | Pragmatisme pembangunan dan mendekat ke blok Barat (AS) sebagai sekutu Barat membendung komunisme | Secara ekonomi condong ke kapitalisme global (neoliberalisme) tapi secara politik menentang kritik Barat tentang HAM dan demokrasi | Di bawah kendali IMF dan Bank Dunia untuk pemulihan dari krisis ekonomi | Usaha membangun kekuatan internal sebagai basis untuk bisa “bebas” dan “aktif”. | Usaha menjaga jarak yang sama dengan AS maupun China tetapi tidak terhindar dari kebangkitan ekonomi China, adanya upaya memanfaatkan persaingan negara-negara besar untuk kepentingan pembangunan infra-struktur RI. |
| **Aktor utama** | Pemerintah | Pemerintah | Presiden Soekarno | Presiden Soeharto yang mendominasi pemerintahan dan di bawahnya ada Departemen Luar Negeri, ABRI/Hankam, BAKIN, Sekretaris Negara, Menko Ekonomi, Keuangan dan Industri dan dukungan *private think tank* CSIS yang didukung oleh militer (Ali Moertopo, Sudjono Hoemardhani dan Benny Moerdani) | Sama dengan sebelumnya hanya peranan CSIS sebagai *think tank* digantikan oleh CIDES yang berafiliasi dengan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan didukung petinggi ABRI. | Awal mulanya kekuatan-kekuatan di luar pemerintahan mulai ikut berperan dalam kebijakan luar negeri RI seperti Ormas NU dan PKB yang diwakili oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Menlu Alwi Shihab | Pemerintah, Komisi I DPR, Media dan Ormas Keagamaan dan Masyarakat melalui media sosial | Pemerintah, Komisi I DPR, Media dan Ormas Keagamaan dan Masyarakat melalui media sosial |
| **Diplomasi dan Penyelesaian Masalah atau Pencapaian Tujuan (*problem-solving* dan *goal attainment*)** | Diplomasi yang berhasil meraih pengakuan Belanda dan dukungan internasional serta peletakan prinsip dasar kebijakan luar negeri RI | Campuran antara diplomasi yang menyimpang dari prinsip bebas aktif, ketidakstabilan dalam negeri dan inisiatif KAA | Diplomasi yang berpusat pada kharisma pribadi presiden dan muatan ideologis yang sangat kental dalam kebijakan luar negeri | Diplomasi yang berhasil mendatangkan investasi asing tapi dikombinasikan dengan KKN dan pelanggaran HAM sehingga berujung pada krisis ekonomi dan kejatuhan Orde Baru | Diplomasi yang berhasil mendatangkan investasi asing tapi dikombinasikan dengan KKN dan pelanggaran HAM sehingga berujung pada krisis ekonomi dan kejatuhan Orde Baru | Ketidaksejalanan diplomasi dan aksi militer pasca jajak pendapat di Timor Timur 1999 berujung intervensi kemanusiaan DK PBB dan embargo senjata oleh AS | Keberhasilan Indonesia mengkombinasikan *development, democracy and stability* sebagai basis identitas baru kebijakan luar negeri sebagai *emerging market* (RI anggota G 20) dan kekuatan moderat meskipun belum ditunjang oleh *good governance* karena korupsi di kalangan partai politik termasuk Partai Demokrat yang berkuasa | Kebijakan luar negeri yang lebih diorientasikan untuk kepentingan dalam negeri seperti pembangunan infrastruktur, *good governance* dan daya saing dan perluasan pasar melalui diplomasi ekonomi meskipun maraknya politik identitas merusak citra Indonesia sebagai kekuatan moderat. |

**Penggambaran evolusi kebijakan luar negeri RI ini (oleh Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D) didasarkan pada referensi pilihan berikut ini**:

* Acharya, Amitav (2014).*Indonesia Matters: Asia’s Emerging Democratic Power*. World Scientific.
* Anak Agung, Gde Agung (1976). *Twenty Years of Indonesia’s Foreign Policy*. Hague: Mouton; Chapter 1 – 5.
* Jemadu, Aleksius (2017). *Politik Global dalam Teori dan Praktik* Edisi Kedua. Yogayakarta: Graha Ilmu,
* Shekar, Vibanshu (2018). *Indonesia’s Foreign Policy and Grand Strategy in the 21st Century: The Rise of an Indo-Pacific Power*. London: Routledge.
* Sukma, Rizal (1995). “The Evolution of Indonesia’s Foreign Policy: An Indonesian View”. *Asian Survey,* Volume 35 No. 3 (March 1995). pp. 304 – 315.
* Suryadinata, L. (1996). *Indonesia’s foreign policy under Soeharto, aspiring international leadership*. Singapore: Times Academic Press.

**Website**:

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/26/tentang_kami/perkembangan-kementerian-luar-negeri> diakses 20 Juli 2019.